

ABSTRAK

Lulu Ulfie Rahayu Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Penyitaan Harta Kekayaan Debitor Yang Dilakukan Kurator Dihubungkan Dengan Asas Keadilan.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perjanjian jual beli berupa PPJB (Pengikat Perjanjian Jual Beli yang dilakukan sebelum Debitor (penjual) dinyatakan pailit dengan pihak ketiga (pembeli). Setelah PPJB berjalan selama 5 (lima) tahun, pihak penjual dinyatakan pailit dan objek perjanjian tersebut belum atas nama pihak ketiga,, sehingga pada saat penjual (Debitor pailit), objek dari PPJB tersebut masuk dalam daftar *boedel pailit* oleh kurator, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga sebagai pembeli.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kedudukan pihak ketiga atas harta kekayaannya yang terdaftar dalam sita umum oleh kurator, untuk mengetahui pertanggungjawaban kurator terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam melakukan penyitaan dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap pihak ketiga atas harta kekayaannya yang terdaftar dalam sita umum oleh kurator. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran diantaranya adalah teori keadilan sebagai *grand theory* yang membahas persamaan hak sesuai dengan proposionalnya, *middle theory* yang digunakan adalah teori perjanjian karena permasalahan ini berkaitan dengan kesepakatan para pihak dan *apply theory* menggunakan teori kepailitan karena ada hubungannya dengan kepailitan serta teori perlindungan hukum, karena setiap subjek hukum harus mendapatkan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yakni dengan cara mengumpulkan data, mempelajari, menganalisis peraturan undang-undang yang berkaitan dengan kepailitan, perlindungan hukum dan perjanjian serta memaparkan data-data yang didapat dari hasil analisa peraturan perundang-undangan dan wawancara dari pihak akademis dan praktisi. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah *Pertama*, perjanjian jual beli dilakukan sebelum Henry Husada dinyatakan pailit dan sudah berlangsung selama lima tahun, perjanjian tersebut dituangkan dalam PPJB Lunas, namun pada saat Henry Husada dinyatakan pailit objek dari perjanjian jual beli tersebut masuk kedalam *boedel* pailit. *Kedua*, penyelesaian yang dilakukan oleh majelis hakim melalui putusannya adalah menolak gugatan dari PT Setiabudi selaku pembeli dan pihak ketiga dalam pailitnya Henry Husada. *Ketiga*, Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pihak ketiga adalah perlindungan hukum secara *preventif* yaitu kurator harus benar-benar melihat secara rinci mengenai bentuk kepemilikan dari aset yang telah masuk ke dalam *boedel* pailit. Kemudian pihak ketiga mendapatkan perlindungan hukum secara *represif* pada Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Kepailitan No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, KUHPdt pada Pasal 1365, Pasal 1338, Pasal 279 Rv.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, kepailitan, perjanjian, sita umum

ABSTRACT

Lulu Ulfie Rahayu Legal Protection for Third Parties in the Confiscation of the Debtor's Assets Conducted by the Curator is Connected to the Principle of Justice.

The background of this research is the sale and purchase agreement in the form of a PPJB (Binding Sale and Purchase Agreement made before the Debtor (seller) is declared bankrupt with a third party (buyer). After the PPJB has been running for 5 (five) years, the seller is declared bankrupt and the object of the agreement has not been the name of the third party, so that when the seller (debtor goes bankrupt), the object from the PPJB is included in the list of bankrupt boedel by the curator, causing losses to the third party as a buyer.

The purpose of this research is to find out the legal protection of third party positions for their assets which are registered in a general confiscation by the curator, to find out the curator's responsibility for the management and settlement of bankrupt assets in carrying out the confiscation and to find out the legal consequences for third parties for their assets registered in the general confiscation by the curator. This study uses a framework of thought including the theory of justice as a grand theory which discusses equal rights in accordance with its proposition, the middle theory used is the agreement theory because this problem relates to the agreement of the parties and apply theory uses bankruptcy theory because it has something to do with bankruptcy and the theory of legal protection, because every legal subject must get legal protection. The research method used is a descriptive analysis method by collecting data, studying, analyzing laws relating to bankruptcy, legal protection and agreements and presenting the data obtained from the analysis of laws and regulations and interviews with academics and practitioner. This research approach uses a normative juridical approach with a qualitative research type.

The results of this study are First, the legal protection obtained by third parties is preventive legal protection, namely the curator must really look in detail about the form of ownership of assets that have entered into a bankruptcy estate. Then third parties get repressive legal protection in Article 3 paragraph (1) of the Bankruptcy Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, Criminal Code in Article 1365, Article 1338, Article 279 Rv concerning intervention. The two curators are responsible for the management and settlement of bankrupt assets, because they made mistakes during the execution. The three legal consequences obtained by third parties in the form of material and immaterial losses and PPJB are considered not to exist because they are not strong evidence.

Keywords: *Legal protection, bankruptcy, agreement, general confiscation*